

**POLA KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN PROGRAM
TABUNGAN SOSIAL ANAK (TASA)
(Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

WIWIK SUKATMI SHUHROTUL AMININ



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT
COORDINATION PATTERN IN THE MANAGEMENT OF TABUNGAN
SOSIAL ANAK (TASA) PROGRAM (STUDY ON THE SOCIAL SERVICE OF
LAMPUNG PROVINCE)

By
WIWIK S.S.A

Coordination is crucial in determining the success of a program, including TASA program, coordination is required to integrate and align various interests and related activities in order to achieve Common goals. Every institution that runs a policy program certainly has a goal that must be achieved, to realize and develop its existence requires effective and efficient coordination. In implementing a program unprofessionally can inhibit the objectives that have been established and can lead to inefficiencies in terms of resources, time and infrastructure, therefore needed a good coordination Various elements, in order to achieve a common goal. This research aims to identify coordination patterns and constraints in the management of TASA program. The type of research used is a type of descriptive study with a qualitative approach. Then the data collection techniques are done with interviews, documentation and observations.

The results of this research show that the coordination pattern conducted by the social service of Lampung Province, LKSA Bussaina and BNI Tanjung Karang bank is interrelated horizontal coordination pattern. Coordination conducted by the Social service of Lampung Province with LKSA Bussaina and BNI Tanjung Karang bank has been running quite well. It can be seen from 6 elements of effective coordination that are organizational units, resources (potentials), integration, motion activities, compatibility, and the same direction (objectives). Coordination issues are time orientation differences, geographical distance differences, and low communication.

Keywords: coordination, management, TASA

ABSTRAK

POLA KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN PROGRAM TABUNGAN SOSIAL ANAK (TASA) (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

WIWIK S.S.A

Koordinasi merupakan hal yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan suatu program, termasuk program TASA, koordinasi diperlukan untuk memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Setiap lembaga yang menjalankan suatu program kebijakan tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai, untuk mewujudkan dan mengembangkan eksistensinya memerlukan koordinasi yang efektif dan efisien. Dalam mengimplementasikan suatu program secara tidak profesional dapat menghambat tujuan yang sudah ditetapkan dan dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam segi sumberdaya, waktu dan sarana prasarana, oleh sebab itu dibutuhkan suatu koordinasi yang baik dari berbagai elemen, guna mencapai suatu tujuan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola koordinasi serta kendala dalam pengelolaan program TASA. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung, LKSA Bussaina dan Bank BNI Tanjung Karang merupakan pola koordinasi *horizontal interrelated*. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan LKSA Bussaina dan Bank BNI Tanjung Karang telah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 6 unsur koordinasi yang efektif yaitu Unit-Unit Organisasi, Sumber-sumber (potensi), Kesatupaduan, Gerak kegiatan, keserasian, dan arah yang sama (tujuan). Masalah koordinasi yaitu perbedaan orientasi waktu, perbedaan jarak geografis, serta rendahnya komunikasi yang terjalin.

Kata kunci : Koordinasi, pengelolaan, TASA

**POLA KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN PROGRAM
TABUNGAN SOSIAL ANAK (TASA)
(Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)**

Oleh

WIWIK S.S.A

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **POLA KOORDINASI DALAM
PENGELOLAAN PROGRAM TABUNGAN
SOSIAL ANAK (TASA)
(Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Wiwik Sukatmi Shuhrotul Aminin**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516041115

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001

Nana Mulyana S.IP, M.Si.
NIP 19710615 2005 01 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. 

Sekretaris : Nana Mulyana S.IP, M.Si. 

Penguji Utama : Syamsul Ma'arif S.IP, M.Si. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Juni 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 21 Juni 2019

Penulis



WIWIK S.S.A

NPM 1516041115

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Wiwik Sukatmi Shuhrotul Aminin , penulis dilahirkan di Pematang Tahalo, 23 Juni 1996. Penulis merupakan putri dari Bapak Sumaji dan Ibu Wartini, memiliki seorang kakak yang bernama Didik Santoso.

Penulis Mengawali pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Pematang Tahalo Jabung Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2002, lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri di SDN Pematang Tahalo Jabung Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN Terpadu Melinting Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2011, dan dilanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Way Jepara Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui seleksi Ujian Mandiri (UM) pada Tahun 2015. Pada tahun 2018, penulis melaksanakan KKN di Desa Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu Tercinta

Kakakku tersayang

Terima kasih untuk semua dukungan baik moril maupun materil,

Kasih sayang dan segala doa untukku

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Para pendidik dan Almamater tercinta....

Universitas Lampung

Motto

Hidup dapat dipahami dengan berpikir kebelakang. Tapi ia juga harus dijalani dengan berpikir kedepan.

-Soren Kierkegaard-

Do What You Love and Love What You Do

-Anonim-

Teruslah berbuat baik, karena kebaikanmu adalah investasi terbaik untuk dirimu sendiri

-Wiwik S.S.A-

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri”

-QS. Al-ankabut(29):6

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pola Koordinasi dalam Pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak (TASA) (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritiknya yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Allah S.W.T Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Nabi Muhammad S.A.W yang menjadi tauladan semua umatnya hingga akhir zaman kelak.
2. Bapak Eko Budi Sulistio., S.Sos., M.AP. selaku pembimbing utama. Terima kasih atas bimbingan, saran, semangat, motivasi serta kesabaran kepada penulis selama penelitian sehingga penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Nana Mulyana., S.IP., M.Si. selaku pembimbing kedua.

Terima kasih atas bimbingan, saran, semangat, motivasi serta kesabaran kepada penulis selama penelitian sehingga penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Syamsul Ma'arif., S.IP., M.Si. selaku dosen pembahas.

Terima kasih atas bimbingan, motivasi serta segala masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan dalam bentuk motivasi serta dorongan moril dan materil yang diberikan selama ini.
6. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
8. Ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNILA. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga bagi penulis ke depannya.
10. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNILA yang telah memberikan pelayanan dan kelancaran administrasi sehingga penulis dapat terbantu dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
12. Seluruh informan penelitian yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13. Sahabat, teman seperjuangan yang sudah menemani selama kurang lebih 4 tahun ini Sonia Gusti Mauliza, terimakasih sudah mau menemani dalam sedih ataupun senang, mau mendengarkan keluh kesah selama ini, mau ngenterin kesana sini, yang selalu mau direpotkan, selalu mau jemput ketika berangkat kuliah, yang mau nganterin untuk penelitian, dan semoga tetap menjadi saudara perempuanku.
14. Irma Ayu Sundari sahabat dari maba yang sudah seperti adik perempuan, satu kosan, yang selalu bareng dalam keadaan apapun, terimakasih sudah mau menemaniku sampai saat ini, yang selalu mau membantu disaat susah maupun senang, yang selalu menemani dan mendengarkan cerita-ceritaku, saling menasihati, selalu mendukung dalam keadaan apapun, saling mendoakan, semoga akan terus menjadi sahabat sekaligus adik perempuanku.
15. Fitri Wulandari sahabat yang selalu menjadi pendengar yang baik terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada, saling mendukung, dan saling menasihati.
16. Rindi Aprelia dan Oktaviani Wanatia sahabat dari SMA yang selalu menemani sampai saat ini, terimakasih atas perhatian, waktu dan sudah menemaniku dalam susah maupun senang.
17. Desta Rapanca, Voni Leorna sahabat seperjuangan, Terima kasih atas kebahagiaan, keceriaan dan kebersamaan selama kuliah di Universitas Lampung.
18. Nisa Wiji Wati, Bestha Lady, Regita Putri Melinda, terimakasih sudah banyak membantu dalam proses perskripsian.
19. Irfan Wahyudi, terimakasih sudah menemani diakhir proses perskripsian.
20. Teman- teman ATLANTIK (ANE 2015) atas persahabatan, doa, dukungan serta kebersamaan selama proses perkuliahan. Semoga kita semua sukses. Aamiin.

21. Teman- teman KKN Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus Annisa Putri, Silvia, Nuke Agustin, Tegar Ramadhan Akbar, M. Arief S, Chaidir Ali terima kasih untuk pengalaman berharganya selama 40 hari.
22. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, kenangan dan juga teman.
23. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Bandar Lampung, 28 Juni 2019

Penulis

Wiwik S.S.A

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
 I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
 II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tentang Pola Koordinasi.....	14
1. Konsep Pola Koordinasi.....	14
2. Konsep Koordinasi	14
3. Hakikat koordinasi	17
4. Ciri-ciri koordinasi	21
5. Tujuan dan Manfaat Koordinasi.....	22
6. Prinsip-Prinsip Koordinasi	23
7. Kebutuhan akan Koordinasi	24
8. Tipe-Tipe Koordinasi	25
9. Pendekatan terhadap Tercapainya Koordinasi yang Efektif	27
10. Indikator Koordinasi	27
11. Unsur-Unsur Koordinasi	28
12. Masalah-Masalah dalam Koordinasi.....	30

2.2 Pengertian Kemiskinan	32
2.3 Konsep Kesejahteraan Sosial	34
2.4 Pengertian Tentang Program Tabungan Sosial Anak (TASA)	36

III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	40
3.2 Fokus Penelitian	41
3.3 Lokasi Penelitian	44
3.4 Informan Penelitian	45
3.5 Data dan Sumber Data Penelitian	46
3.6 Instrumen Penelitian	47
3.7 Teknik Pengumpulan Data	48
3.8 Teknik Analisis Data	51
3.9 Teknik Keabsahan Data	53

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	56
4.1.1 Profil Dinas Sosial Provinsi Lampung	56
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Lampung	57
4.1.3 Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial Provinsi Lampung	58
4.1.4 Struktur Organisasi	60
4.1.5 Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bussaina ..	61
4.2 Hasil Penelitian	68
4.2.1 Definisi Program Tabungan Sosial Anak (TASA)	68
4.2.2 Pola Koordinasi Dalam Pengelolaan Program (TASA)	71
1. Organisasi-Organisasi Terkait	71
2. Hasil Sumber-sumber (potensi)	77
3. Kesatupaduan Pengelolaan Program	78
4. Gerak Kegiatan Pengelolaan Program	81

5. Keserasian Pengelolaan Program	85
6. Arah yang sama atau sasaran program.....	86
3. Kendala dalam koordinasi Program TASA	89
4.3 Pembahasan.....	91
4.3.1 Pola koordinasi	91
4.3.2 Pendekatan Koordinasi menurut Dann Sughandha harus meliputi 6 unsur	
1. Unit-Unit atau Organisasi-Organisasi	94
2. Sumber-sumber (potensi)	96
3. Kesatupaduan	98
4. Gerak Kegiatan.....	101
5. Keserasian	105
6. Arah yang sama (Tujuan).....	106
7. Kendala Dalam Koordinasi Pihak Dinas Sosial	
Bank BNI serta LKSA	109

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2015.....	4
2. Kelengkapan Data Bantuan Sosial Tabungan Sosial Anak (TASA) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2018.....	9
3. Informan Terkait Koordinasi Pengelolaan Program TASA.....	46
4. Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	103

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1. Perjanjian Kerjasama TASA antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan BNI Cabang Tanjung Karang	72
2. Penandatanganan Mou diwakili oleh Pimpinan BNI Cabang Tanjung Karang Bapak Tri Setia Hadi di ruang rapat BNI Cabang Tanjung Karang	73
3. Rapat terkait program TASA	75
4. Sosialisasi antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan LKS/LKSA Se-Provinsi Lampung	75
5. Rapat terkait perjanjian kerjasama program TASA	79
6. Rapat terkait perjanjian kerjasama program TASA	80
7. Rapat Dinas Sosial dengan LKSA Se-Lampung terkait pengelolaan program TASA	82
8. Rapat dan pengumuman Verifikasi data	82
9. Pembagian TASA oleh ketua TP PKK pada saat memperingati One Day Children di SLB PKK Provinsi Lampung	83
10. Pembagian Tabungan Serta hadiah untuk murid SLB PKK..	83
11. Rapat terkait pemverifikasian data LKS/LKSA	

Se-Provinsi Lampung.....	84
12. Pembagian Rekening TASA di Sekolah Luar Biasa (SLB) PKK oleh Yustin Ficardo selaku ketua PKK provinsi Lampung	87
13. Pertemuan serta pengumuman Pembagian rekening TASA antara ketua PKK dengan anak-anak LKSA Bussaina	87
14. Kunjungan Lapangan Dinas Sosial Provinsi Lampung ke LKSA Bussaina	89
15. Pola koordinasi Dinas Sosial Provinsi Lampung, BNI Tanjung Karang dan LKSA Bussaina	93

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kesejahteraan sosial merupakan tugas bagi pemerintah. Konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat. (Sumber: Agustina, Dewi.2014. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus Terpadu. <http://m.Tribunnews.com/amp/> . Diakses pada 1 Agustus 2018 pukul 15.40)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial . Pasal 1 ayat 3, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau

gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Yang termasuk kedalam jenis PMKS antara lain anak balita telantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak jalanan, anak dengan kedisabilitas (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), lanjut usia terlantar (sumber: Peraturan Menteri Kementerian Sosial Nomor 8 Tahun 2012. Peraturan.go.id/permen.kemensos.nomor-8-tahun-2012.html diakses pada 01 Agustus 2018 pukul 15.00)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kewenangan provinsi. Dengan adanya pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah maka daerah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan dan pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakatnya. Otonomi diberikan agar pemerintah daerah leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dalam hal ini, berdasarkan Pusat Data Informasi Dinas Sosial Lampung jumlah PMKS sebanyak 153.390 orang dan 730.552 kepala keluarga. Permasalahan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung dirasakan semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif . Berdasarkan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial diamanatkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di prioritaskan kepada mereka yang tidak layak secara kemanusiaan (Sumber: Pencerahan Kepala Dinas Sosial Provinsi

Lampung. <http://Lampungprov.go.id/berita/pencerahan-kepala-dinas-sosial-provinsi-lampung-kepada-lembaga-kesejahteraan-sosial-lks-seprovinsi-.html>. Diakses pada 02 Agustus 2018 pukul 14.30).

Berikut data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2015.

Tabel 1

No	Kab/Kota	Anak balita terlantar	Anak Terlantar	ABH	Anak jalanan	Anak dengan kedisabilitas	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah
1	Lambar	131	511	2	-	164	-	808
2	Tanggamus	128	492	20	195	375	29	1239
3	Lamsel	368	4855	25	350	37	-	5635
4	Lamtim	474	1845	35	72	696	112	3234
5	Lamteng	931	2265	105	117	829	-	4247
6	Lamut	38	1175	149	28	834	-	2224
7	Way Kanan	108	289	-	-	194	40	631
8	Tulang Bawang	878	2007	25	-	467	1	3378
9	Pesawaran	608	2884	759	33	-	-	4284
10	Pringsewu	439	159	29	65	354	-	1046
11	Mesuji	168	414	10	-	164	11	767
12	Tubaba	-	-	-	-	4	-	4
13	Pesisir Barat	188	356	47	5	81	19	696
14	Bandar Lampung	189	284	31	72	417	18	1011
15	Metro	47	100	1	-	122	-	270

umber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1 diatas, pada Tahun 2015 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi Lampung masih tercatat cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, balita terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kabupaten-Kabupaten yang ada di lampung, yaitu Lampung Barat dengan jumlah keseluruhan 808 anak, Tanggamus dengan jumlah 1.239 anak, Lampung Selatan dengan jumlah 5.635 anak, kemudian Lampung Timur dengan jumlah 3.234 anak, Lampung Tengah yakni dengan jumlah 4.247 anak, selanjutnya Way Kanan dengan jumlah 631 anak, Tulang Bawang dengan jumlah 3.378 anak, Pesawaran dengan jumlah 4.284 anak, Pringsewu dengan jumlah 1.046 anak, Mesuji

dengan jumlah 767 anak, Tulang Bawang Barat dengan jumlah 4 anak, kemudian Pesisir Barat dengan jumlah 696 anak, Bandar Lampung dengan jumlah 1.011 anak, dan yang terakhir Kota Metro dengan jumlah 270 anak. Dan jika dijumlahkan secara keseluruhan yakni 29.474 anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Lampung tergolong relatif tinggi, sehingga perlu adanya pengentasan PMKS anak di Provinsi Lampung agar dapat mengurangi bahkan terbebas dari PMKS. Tentu saja dalam upaya pengentasan permasalahan tersebut diperlukan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Penanganan PMKS sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial, seperti melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, memberikan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat (sumber : Dami , Laurens.2015.Penanganan PMKS perlu dijadikan Prioritas Pemerintah. www.beritasatu.com/nasional/penanganan-PMKS.html. Diakses pada 28 November 2018 pukul 14.25)

Mengacu pada peraturan diatas, pemerintah melakukan pengembangan pola operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Kementerian Sosial Bersumber pada rumusan Rencana Strategis Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 2015-2019, dan mengacu pada Kebijakan Nasional tentang pemenuhan hak anak telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. PKSA dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat (*Conditional Cash Transfer*). Sebagai wujud dari PKSA Kemensos menginisiasi suatu program yaitu Tabungan Sosial Anak (TASA) (Sumber : Petunjuk Teknis Bantuan Sosial TASA Kemensos RI).

TASA pertama kali diluncurkan secara resmi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada 20 Agustus 2017 lalu. TASA ini akan menjadi tabungan yang digunakan untuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Tabungan Sosial Anak (TASA) adalah salah satu program bantuan sosial yang disalurkan melalui Dana Pusat dan Dekonsentrasi dalam rangka mendukung pengasuhan anak berbasis keluarga. Dalam implementasi program Tabungan Sosial Anak, menteri sosial bersinergi dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi yang bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS/LKSA) dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Bantuan sosial (TASA) ini dirancang untuk menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya (Sumber: Redaksi in Nasional.2017. Program Tabungan Sosial

Untuk Anak Jalanan Bisa Lebih Baik. <http://sinarkeadilan.com/program-tabungan-sosial-untuk-anak-semoga-kehidupan-anak-jalanan-bisa-lebih-baik/>. (diakses pada 01 Agustus 2018 pukul 15.30))

Kementerian Sosial bersama PT Bank Negara Indonesia (BNI) memberikan bantuan sosial nontunai melalui Tabungan Sosial Anak (TASA). Tabungan ini akan diberikan kepada 23.800 anak di Indonesia dengan nominal Rp 1 juta untuk setiap anak per tahunnya. Bantuan tersebut dikhususkan bagi anak-anak di bawah 18 tahun. Secara umum kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat program PKSA di Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI adalah balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK), dan anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses layanan sosial dasar. Mereka diharapkan memiliki kebiasaan menabung untuk memberikan stimulan kepada keluarganya bahwa anak-anak ini dipersiapkan untuk pendidikannya, kesehatan, dan kegiatannya untuk tumbuh dan berkembang. (Sumber : Petunjuk Teknis Bantuan Sosial TASA Kemensos RI).

Berikut merupakan data-data daerah yang sudah mengimplementasikan program TASA yaitu secara simbolis Kemensos telah membagikan buku tabungan pada 20 Agustus 2017 kepada anak-anak terlantar di Baduy sebanyak 75 anak dan 491 identitas sudah terverifikasi, selanjutnya untuk DKI Jakarta pada 6 September 2018 sebanyak 1.199 anak sudah mendapatkan tabungan senilai satu juta rupiah, Dinas sosial Cimahi mendata 310 anak diusulkan untuk program TASA, Pada 5 Agustus 2018 pemerintah provinsi Jawa Timur telah membagikan TASA kepada 4.003 anak

se-jawatimur, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TASA dibagikan kepada 600 anak, pada 16 maret tahun 2018 Pemerintah kota Jambi membagikan TASA kepada 75 anak, dan 2 LKSA Nurul yaqin di Balangan Banjarmasin mendapat TASA.

Melalui anggaran dari Kemensos RI, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung yang bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS/LKSA), akan membagikan bantuan khusus berupa Tabungan Sosial Anak (TASA) kepada PMKS penerima program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi Lampung. Pada tahun 2017, penandatanganan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kemensos RI. Namun mengingat pertimbangan teknis maka pada tahun 2018 ini baru dilaksanakan oleh masing-masing daerah.

Menurut observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada 27 September 2018, terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam proses pengelolaan program TASA, permasalahannya antara lain kurangnya kerjasama yang optimal dari ketiga pihak yaitu Dinas Sosial Provinsi Lampung, LKSA, dan Bank BNI, hal ini ditunjukkan dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Lampung, hal ini terjadi karena kesibukan masing-masing instansi dalam menjalankan program pemerintah setiap tahunnya, menurut keterangan dari pihak Dinas Sosial proses pengelolaan TASA juga sempat berhenti selama kurang lebih 3 bulan terhitung mulai bulan Juli 2018, sehingga menurut peneliti hal yang terjadi dapat mempengaruhi efisiensi penyaluran program TASA.

Permasalahan kedua yaitu minimnya informasi yang didapat dari pihak LKSA terutama kabupaten-kabupaten yang jauh dari perkotaan, hal ini diindikasikan karena kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan LKSA hal ini didukung oleh sedikitnya jumlah proposal/data yang lengkap dari masing-masing LKSA terhitung sampai bulan juni sementara menurut petunjuk teknis pada akhir tahun 2018, TASA sudah harus dibagikan kepada penerima manfaat.

Berikut merupakan tabel kelengkapan data calon penerima Bansos TASA Dinas Sosial Provinsi Lampung

Tabel 2. Kelengkapan Data Bantuan Sosial Tabungan Sosial Anak (TASA) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2018

NO	KAB/KOTA	JML LKS/LKSA	TANGGAL MoU	KELENGKAPAN PROPOSAL
1	LAMBAR	12	30 Mei 2018	9 lengkap, 3 belum lengkap
2	LAMUT	18	30 Mei 2018	5 lengkap, 13 belum lengkap
3	PRINGSEWU	4	31 Mei 2018	2 lengkap, 2 belum lengkap
4	METRO	2	31 Mei 2018	2 Belum lengkap
5	PESAWARAN	10	31 Mei 2018	1 lengkap, 9 belum lengkap
6	TANGGAMUS	1	31 Mei 2018	Lengkap
7	TUBABA	5	31 Mei 2018	2 Lengkap, 3 Belum lengkap
8	LAMSEL	15	4 Juni 2018	3 Lengkap, 12 Belum lengkap
9	TULANG BAWANG	9	4 Juni 2018	Belum Lengkap
10	PESISIR BARAT	5	4 Juni 2018	Belum Lengkap
11	LAMTENG	23	5 Juni 2018	Belum Lengkap
12	MESUJI	31	6 Juni 2018	4 Lengkap, 27 Belum Lengkap
13	LAMTIM	17	7 Juni 2018	15 Lengkap, 2 Belum Lengkap
14	WAY KANAN	7	7 Juni 2018	2 Lengkap, 5 Belum lengkap
15	BANDAR LAMPUNG	18	8 Juni 2018	4 Lengkap, 14 belum lengkap

Sumber : Data diolah oleh peneliti Tahun 2018

Jika dilihat dari tabel dua, terlihat masih banyaknya data atau proposal dari LKSA yang berada di Lampung yang belum lengkap, yang mana dari 177 LKSA yang ada, hanya 48 LKSA yang datanya sudah lengkap dan terdapat 129 LKSA yang datanya

masih belum lengkap sampai dengan bulan Juni 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya informasi dari masing-masing LKSA

Sehubungan dengan masalah-masalah yang peneliti paparkan diatas, maka koordinasi diperlukan untuk memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan bersama, karena menurut peneliti koordinasi merupakan hal yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan program, Namun sayangnya koordinasi dalam pengelolaan program TASA tidak semudah yang dibayangkan sebagaimana yang terjadi antara Dinas Sosial Provinsi Lampung, LKSA Bussaina dan BNI Tanjung Karang yaitu kurang optimalnya kerjasama yang dilakukan antar pihak hal tersebut didukung dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan proses pengelolaan TASA juga sempat berhenti selama kurang lebih 3 bulan terhitung mulai bulan Juli 2018, serta minimnya informasi yang didapat dari pihak LKSA terutama kabupaten-kabupaten yang jauh dari perkotaan, hal ini diindikasikan karena kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan LKSA hal ini didukung oleh sedikitnya jumlah proposal/data yang lengkap dari masing-masing LKSA, sehingga menurut peneliti hal yang terjadi dapat mempengaruhi efisiensi penyaluran program TASA, dan dalam mengkoordinasikan suatu program secara tidak professional dapat menghambat tujuan yang sudah ditetapkan dan dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam segi sumberdaya, waktu dan sarana prasarana, oleh sebab itu dibutuhkan suatu koordinasi yang baik dari berbagai pihak terkait, guna mencapai suatu tujuan bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Sughandi (1991)

Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien.

Kemudian pendekatan koordinasi menurut Sughandha (1991) meliputi 6 unsur yaitu :

1. Unit-unit
2. Sumber-sumber atau potensi
3. Kesatupaduan
4. Gerak kegiatan
5. Keserasian
6. Arah yang sama atau sasaran

Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai organisasi pemerintah yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang kesejahteraan sosial lampung dengan instansi terkait harus memiliki strategi koordinasi terbaik untuk keberlangsungan program TASA agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Mengingat bahwasannya koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan program maka penulis memandang perlu adanya kajian serius tentang Pola Koordinasi dalam pengelolaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam dengan judul **“Pola Koordinasi dalam Pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak (TASA) (Studi pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yaitu

1. Bagaimanakah Pola Koordinasi yang terjadi dalam Pengelolaan TASA Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung?
2. Kendala-Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan Pola Koordinasi serta mendeskripsikan koordinasi yang terjadi dalam Pengelolaan TASA Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan program Tabungan Sosial Anak (TASA).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pengetahuan terutama dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya

yang berkaitan dengan Pola Koordinasi serta koordinasi yang terjadi pada Pengelolaan Program.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menyempurnakan atau memperbaiki pola koordinasi pengelolaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Pola Koordinasi

1. Konsep Pola

Menurut Soerjono Sukanto (1993:315), kata pola (*pattern*) adalah standardisasi, pengulangan, organisasi atau arah dari perilaku. Selain itu juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala, dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri (Aryono Suyono, 1985:327).

Berdasarkan pengertian dari teori-teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pola adalah sebuah sistem kerja untuk digunakan dalam menggambarkan suatu gejala/fenomena tertentu.

2. Konsep Koordinasi

Berbicara mengenai konsep koordinasi terdapat banyak definisi menurut para ahli. Sebelumnya kata Koordinasi dalam bahasa Inggris *coordination*, berasal dari bahasa Latin yakni *cum* yang berarti berbeda-beda, dan *ordinare* yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusannya. Koordinasi dalam Mulyasa (2011:131). juga dapat diartikan suatu usaha kerjasama antara badan/instansi. Unit dalam

pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Sementara itu, Koordinasi Pemerintahan Menurut UU No 22 Tahun 1998 menggunakan prinsip kompetensi umum (*General Competence Principles*) dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam rangka desentralisasi dengan membatasi asas dekonsentrasi.

Selanjutnya Koordinasi dalam Afandi (2018: 120) adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumabangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Kemudian Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana (2011:33) Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil .

Sebagaimana dijelaskan Hasibuan (2014:85), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Kemudian Menurut Handoko (2011:195) Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang- bidang fungsional) untuk mencapai tujuan organisasi secara

efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi.

Sedangkan menurut G.R Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur guna menciptakan jumlah, waktu, dan arah pelaksanaan yang tepat agar menghasilkan tindakan yang seragam serta harmoni yang menuju kearah sasaran yang telah ditetapkan.

Pengertian koordinasi menurut Sughandha (1991:101) adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien.

Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan, mengatur, memadukan serta mengintegrasikan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dan merupakan suatu proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak lain.

Koordinasi merupakan bagian terpenting di antara anggota-anggota atau unit-unit organisasi yang pekerjaannya saling bergantung. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga akan terjadi negosiasi agar mendapat kesepakatan.

3. Hakikat koordinasi

Menurut Handayani (1989:118-119) pada hakikatnya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Koordinasi adalah akibat logis daripada prinsip pembagian habis tugas, dimana setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
- b. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisasi, dimana setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi.
- c. Koordinasi juga akibat adanya rentang/jerang pengendalian, dimana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan, dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.
- d. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.

- e. Koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip jalur lini dan staff, karena kelemahan yang pokok dalam bentuk organisasi ini ialah masalah koordinasi.
- f. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik. Oleh karena itu, komunikasi administrasi yang disebut hubungan kerja memegang peranan sangat penting bagi tercapainya koordinasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa koordinasi adalah hasil akhir daripada hubungan kerja (komunikasi).
- g. Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interdependensi inilah yang mendorong diperlakukannya adanya kerjasama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat koordinasi adalah perwujudan dari sebuah kerjasama, saling menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab karena adanya prinsip pembagian tugas, fungsionalisasi dan akibat adanya rentang atau jenjang pengendalian, dimana pimpinan wajib membina, membimbing mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai

satuan kerja yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan agar dapat efektif dan efisien.

Untuk menciptakan suatu koordinasi yang efektif tentu saja diperlukan hubungan kerja dan komunikasi yang baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tunggul (1993:221) bahwa komunikasi adalah sebuah kunci dari koordinasi yang efektif. Koordinasi dan hubungan kerja merupakan dua pengertian yang saling berkaitan, karena koordinasi hanya dapat dicapai dengan baik dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Selanjutnya hubungan kerja merupakan bentuk komunikasi administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) adalah dapat tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasilguna dan berdayaguna.

Berikut merupakan penjelasan hubungan antara proses manajemen dengan koordinasi menurut G.R Terry . Hubungan antara manajemen proses dengan koordinasi bahwa manusia (*men*) yang dilengkapi dengan memiliki bahan (*materials*), mesin (*mechine*), uang (*money*), pasar (*market*), dan metode (*methods*) tidak akan mencapai tujuan organisasinya tanpa menjalankan fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) serta melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal.

a. Perencanaan (*planning*) dan Koordinasi (*Coordination*)

Menurut Terry, pengaruh perencanaan sangat signifikan terhadap koordinasi. Hal ini berarti bahwa sebuah perencanaan harus terinterelasi dan di desain bersama dan oelh sebab itu, kedudukan organisasi menjadi sangat penting.

b. Pengaturan (*Organizing*) dan Koordinasi (*Coordination*)

Menurut Terry, sangat sulit untuk tidak melakukan koordinasi dalam mengimplementasikan “*organizing*” sebagai salah satu fungsi manajemen. Terry telah menjelaskan bahwa : “*Organizing has a profound effect upon coordination because where the component activities are assigned regulates the amount and extend to him is logically expected to maintain co-ordination among their efforts*”. Pendapat Terry tersebut mengindikasikan bahwa manajemen hanya dapat efektif jika melalui koordinasi dan atau keberhasilan “*Organizing*” dalam sebuah koordinasi ditentukan oleh “*coordination*”.

c. Pelaksanaan (*Actuating*) dan Koordinasi (*Coordination*)

Selanjutnya Terry berpendapat bahwa *Actuating* pelaksanaan tipe dan fungsi kepemimpinan (*leadership*) , pengawasan dan instruksi merupakan bentuk “*coordination*” yang sangat dignifikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Terry yang menjelaskan bahwa : “*by employing variation in the intensities of the many different actuating forces a manager helps to achieve coordination*”.

d. Pengawasan (*Controlling*) dan Koordinasi (*Coordination*)

Menurut Terry “*Controlling*” memiliki hubungan langsung dengan “*coordination*” terhadap evaluasi kemajuan pekerjaan. Hal tersebut membantu mensinkronisasikan setiap usaha, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai .

4. Ciri-ciri koordinasi

Ciri-ciri koordinasi menurut Pandi Afandi (2014:120) adalah sebagai berikut :

- a. Seorang pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap koordinasi. Untuk dapat menjalankan koordinasi dengan baik, dibutuhkan suatu kerjasama dari setiap komponen koordinasi
- b. Adanya proses yang berkesinambungan, sebab koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik
- c. Koordinasi adalah konsep yang ditetapkan dalam kelompok, dan bukan terhadap usaha individu. Sejumlah individu yang bekerja sama menghasilkan suatu usaha kelompok benar-benar dikerjakan dengan baik akan menghasilkan pekerjaan organisasi secara keseluruhan dengan baik pula.
- d. Konsep kesatuan tindakan. Pihak terkait harus dapat mengatur usaha dari tiap kegiatan individu sehingga adanya keserasian dalam mencapai hasil.
- e. Masing-masing pihak terkait merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap koordinasi. Untuk dapat menjalankan koordinasi dengan baik, dibutuhkan suatu kerjasama dari setiap komponen organisasi.

Koordinasi juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara utama dalam upaya memelihara koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini dibahas dan diadakan

pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Mengangkat seseorang, membentuk suatu tim atau panitia. Koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi seperti memberikan penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
3. Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
4. Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan.

5. Tujuan dan Manfaat Koordinasi

Tujuan Koordinasi menurut Ndraha (2011:295), yaitu :

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsive-antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan interdependen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Sedangkan menurut Hasibuan (2014:87) tujuan koordinasi yaitu :

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan.
- b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan
- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
- d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
- e. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah organisasi atau perusahaan.
- f. Untuk menghindari tindakan *overlapping* dari sasaran perusahaan.

6. Prinsip-Prinsip Koordinasi

Prinsip-prinsip Koordinasi Menurut Sugandha (1991:101) adalah :

- a. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
- b. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
- c. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.

- e. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.
- f. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
- g. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

Berdasarkan uraian diatas, maka koordinasi memiliki prinsip adanya kesepakatan, koordinator , dan informasi diantara unit-unit yang melakukan koordinasi mengenai kegiatan dan sasaran yang akan dicapai serta membutuhkan sikap saling menghormati terhadap fungsi satu sama lain agar semua dapat berjalan dengan efektif.

7. Kebutuhan akan Koordinasi

Koordinasi dibutuhkan dalam setiap hubungan kerja dalam suatu organisasi, sebab tanpa ada koordinasi setiap anggota dalam suatu organisasi tidak mempunyai pegangan dalam menentukan tujuan mereka, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri. Adanya koordinasi diharapkan membuat keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, sehingga tiap departemen atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan selaras. Koordinasi merupakan usaha untuk menciptakan keadaan yang serasi dan selaras serta seimbang. Kebutuhan

koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan.

Dalam Afandi (2014:122). Terdapat 3 macam saling ketergantungan diantara satuan-satuan organisasi yaitu

1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), apabila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tanpa saling tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskana untuk hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), dimana satuan-satuan organisasi harus melaksanakan pekerjaanya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik (*recipro calinterdependence*) merupakan hubungan member dan menerima antar satuan organisasi.

8. Tipe-Tipe Koordinasi

Menurut Hasibuan dalam Moekijat (1994:86-87), terdapat dua tipe koordinasi yaitu :

- a. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasikan semua anggota yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara

relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

- b. Koordinasi horisontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi kedalam dua bagian yaitu :
- *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan yang lain secara intern ataupun secara ekstern pada unit yang sama tugasnya.
 - *Interrelated* adalah koordinasi antar badan atau unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf, koordinasi horizontal ini relative sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Dalam program bantuan sosial Tabungan Sosial Anak atau yang demikian di singkat TASA, menurut peneliti tipe yang paling cocok digunakan untuk penelitian yaitu tipe koordinasi horizontal *interrelated* karena yang akan penulis teliti adalah koordinasi antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan LKSA yang ada di Lampung karena LKSA adalah lembaga penyalur bantuan sosial tersebut.

9. Pendekatan terhadap Tercapainya Koordinasi yang Efektif

Pendekatan potensi koordinasi ini dikaitkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kunci koordinasi yang efektif adalah komunikasi. Pendekatan potensi koordinasi ini meliputi Sistem Informasi Vertikal, Sistem Informasi Lateral, dan Sistem Informasi Manajer Penghubung.

- a. Sistem Informasi Vertikal adalah suatu sistem informasi dimana informasi dapat dikirimkan ke atas dan ke bawah jenjang organisasi.
- b. Sistem Informasi Lateral
Adalah mengabaikan rantai komando. Hubungan lateral memungkinkan adanya pertukaran informasi yang dibutuhkan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Sistem Informasi Manajer Penghubung
Manajer penghubung mempunyai wewenang formal atas semua.

10. Indikator Koordinasi

Dalam Affandi (125: 2018) koordinasi menunjukkan integritas dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit kedalam suatu usaha yang bekerja kearah tujuan bersama, diukur dengan indikator berikut ini :

- a. Rantai Perintah
Adalah setiap pegawai hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang atasan.
- b. Informasi
Merupakan suatu dasar untuk bertindak atau dasar membuat keputusan, menjelaskan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian.

c. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

d. Tanggung Jawab

Kesanggupan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan.

e. Tujuan

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau situasi yang tidak terdapat sekarang tetapi dimaksudkan untuk dicapai diwaktu yang akan datang.

11. Unsur-Unsur Koordinasi

Menurut Sughandha (1991) Koordinasi diperlukan karena :

1. Suatu unit tak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh unit yang lain
2. Tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fungsi unit lainnya bila seluruh organisasi ingin bergerak dengan lancar dan efektif melaksanakan tugasnya mencapai tujuan.

Berdasarkan hal di atas, Sughandha (1991) menyimpulkan bahwa ada 6 unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi, yaitu :

1. Unit-unit

Unit-unit adalah kelompok-kelompok kerja didalam suatu organisasi yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda.

2. Sumber-sumber atau potensi

Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit suatu organisasi atau pada organisasi-organisasi adalah tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya.

3. Kesatupaduan

Artinya terdapat pertautan atau hubungan diantara sesamanya sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan yang kompak.

4. Gerak kegiatan

Gerak kegiatan adalah segala daya upaya, segala suatu tindakan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok kerja dalam melakukan tugasnya.

5. Keserasian

Keserasian berarti adanya urutan-urutan pengerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi, maupun pertentangan.

6. Arah yang sama atau sasaran
7. Arah yang sama dalam hal ini sebagai pedoman adalah sasaran yang sudah ditetapkan. Segala potensi itu diarahkan ke sasaran yang satu itu juga, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Demikian peneliti menggunakan teori koordinasi yang mencakup 6 unsur menurut Sughanda (1991) karena pendekatan tersebut menurut peneliti merupakan pendekatan yang cocok dan sesuai dengan apa yang ingin peneliti kaji dalam menggambarkan penelitian ini.

11 . Masalah-Masalah dalam Koordinasi

Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch (Handoko, 2003:197) mengungkapkan tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu :

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu

Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik.

2. Perbedaan dalam orientasi waktu

Unit organisasi lain akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek, sedangkan unit organisasi lain memandang tidak masalah dipecahkan dengan jangka panjang.

3. Perbedaan dalam orientasi antar-pribadi

Perbedaan cara pandang antara satu anggota dengan anggota lain.

4. Perbedaan dalam formalitas struktur

Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan.

5. Adanya perbedaan jarak geografis

6. Adanya perbedaan antar manusia karena faktor sosial, budaya, pandangan hidup serta latar belakang pendidikan.

7. Adanya perbedaan dalam ambisi.

8. Minimnya komunikasi

Terlalu sedikitnya komunikasi

Dalam teori lain, menurut Handyaningrat (1989:129) faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi adalah sebagai berikut :

a. Hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural)

Dalam koordinasi vertikal sering terjadi hambatan-hambatan yang disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.

b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional

Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing.

Demikian masalah-masalah dalam pengkoordinasian menurut Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch serta Handayaniingrat. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa masalah atau kendala yang terjadi saat koordinasi program TASA adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan dalam orientasi waktu
- b. Adanya perbedaan jarak geografis
- c. Terlalu sedikitnya komunikasi
- d. Tidak terdapatnya hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing.

12. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang yang sedang membutuhkan bantuan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Beberapa ahli mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kemiskinan. Berikut definisi kemiskinan menurut para ahli.

- a. Benyamin White dalam Dillon (1993:10) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan criteria tingkat tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainnya .
- b. Parsudi Suparlan dalam Suparlan (1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- c. Dalam Konteks Politik, John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial
- d. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik (*BPS dan Depsos 2002*) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Dilihat dari perspektif sosial dan struktur sosial, kemiskinan dimaknai sebagai kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung seseorang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitasnya meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Dalam pengertian yang lebih luas kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap

timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Sumber : Hidayati, Nur.2016.Kemiskinan Sebagai Masalah Sosial. <http://nurohidayati29.web.unej.ac.id/2016/05/30/kemiskinan-sebagai-maslah-sosial/>.Diakses pada 6 November 2018 pukul 22.00)

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

13. Konsep Kesejahteraan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesejahteraan merupakan kata benda yang mempunyai arti hal- atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Sedangkan kata sejahtera yang merupakan kata sifat memiliki arti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Menurut Suharto (2006: 3) kesejahteraan sosial termasuk suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Menurut Suparlan dalam Suud (2006:5) Kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang

meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja.

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Suud (2006:8) merupakan system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang member kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Menurut Wickeden dalam Suud (2006:8) mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu system peraturan, program-program , kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memnuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial.

Aksi sosial sebagai metode bantu dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dapat melalui jalan perundang-undangan. Menurut Segal dan Brzuzy dalam Suud (2006:90), kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk sederhana, Sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan yaitu : (1) isu-isu sosial, (2) tujuan-tujuan kebijakan, (3)

perundangan/peraturan, (4) program-program kesejahteraan sosial. System kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali isu sosial tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau peraturan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang diorganisasikan oleh lembaga atau badan dengan memberikan pelayanan yang ditujukan untuk membantu orang perorang dan atau kelompok-kelompok agar dapat mencapai pada taraf hidup yang layak. Dalam hal ini Akhirnya, perundangan diterjemahkan kedalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial telah bekerjasama dengan BNI meluncurkan program tabungan sosial anak yang kemudian dilaksanakan oleh Dinas-Dinas Sosial Daerah termasuk Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial anak.

14. Pengertian Tentang Program Tabungan Sosial Anak (TASA)

1. Konsep Program

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Berdasarkan pengertian tersebut, program merupakan sebuah rancangan dari proses pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Menurut Jones dalam Rohman (2009: 102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan sehingga

implementasi program merupakan proses pelaksanaan terhadap suatu rancangan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Program yang baik menurut Tjokromidjojo harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan yang akan dihasilkan program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri
- f. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi masyarakat.

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi instruksi yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Program dapat diimplementasikan dengan terlebih dahulu mengetahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan

waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Konsep Program Tabungan Sosial Anak (TASA)

Tabungan Sosial Anak (TASA) adalah salah satu program bantuan sosial yang disalurkan melalui Dana Pusat dan Dekonsentrasi dalam rangka mendukung pengasuhan anak berbasis keluarga. Bantuan sosial ini dirancang untuk menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya (Sumber : Chairani.2017.Apa yang dimaksud dengan Tabungan Sosial Anak.*yandatin.kemsos.go.id/index*. diakses pada 01 Agustus 2018 pukul 15.05)

TASA pertama kali diluncurkan secara resmi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada 20 Agustus 2017 lalu. TASA ini nantinya akan menjadi tabungan yang digunakan untuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam implementasi program Tabungan Anak Sejahtera Menteri sosial bersinergi dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi yang bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS/LKSA) dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Bantuan sosial (TASA) ini dirancang untuk menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimilikinya (Sumber: Kemensos dan

BNI Perluas Program Tabungan Sosial Anak (TASA). www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/3276/kemensos-dan-bni-perluas-program-tabungan-sosial-anak-600-anak-gunung-kidul-terima-tasa. diakses pada 01 Agustus 2018 pukul 15.10).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial menunjuk PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk sebagai bank penyalur untuk produk tabungan khusus bagi anak-anak yang menjadi target Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Tabungan yang diberi nama Tabungan Sosial Anak (Tasa) akan menjangkau anak-anak telantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak penyandang di-sabilitas, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk mendapatkan akses pada layanan sosial dasar. Produk kolaborasi BNI, OJK, dan Kementerian Sosial itu didesain untuk meningkatkan akses anak-anak dalam mendapatkan dana bantuan pemerintah. Tasa merupakan pengembangan dari produk tabungan sebelumnya yakni Simpanan Pelajar yang diinisiasi OJK. Peluncuran program itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis buku tabungan Simpel Tasa kepada 10 anak dari suku Badui. Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati mengatakan Tasa diharapkan mampu mengakselerasi inklusi keuangan, sekaligus memperluas customer base bank (Sumber: Kemensos dan BNI Perluas Program Tabungan Sosial Anak (TASA). www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/3276/kemensos-dan-bni-perluas-program-tabungan-sosial-anak-600-anak-gunung-kidul-terima-tasa. diakses pada 01 Agustus 2018 pukul 15.10).

III. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Darmadi (2013:153) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berikut merupakan bagian dari metode penelitian :

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif karena peneliti akan mencoba untuk menggambarkan keadaan secara obyektif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya, mengenai Pola Koordinasi dalam pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak (TASA) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan tentang suatu keadaan secara obyektif dengan menggunakan prosedur penelitian yang bersifat deskriptif yang datanya berupa kata-

kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen. Sesuai dengan pendapat (Moloeng, 2016 :6) yang menyebutkan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menekankan proses penelitian daripada hasil penelitian. Dengan demikian, bukan kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Pola koordinasi dalam pengelolaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, melalui proses wawancara kepada aktor-aktor yang terkait serta data-data yang diperoleh.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian karena dapat membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik. Moloeng mengatakan bahwa fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepastakaan ilmiah ataupun kepastakaan lainnya.

Pendapat Moeloeng menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan masalah penelitian yang dikaitkan dengan sumber kepustakaan ilmiah agar dapat membatasi penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pola koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak (TASA). Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan lembaga atau instansi yang menjalankan program TASA dari Pemerintah Pusat, sedangkan pola koordinasi dalam pengelolaan program menentukan keberhasilan atau efektivitas berjalannya suatu program kebijakan. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Sugandha (1991) bahwa ada 6 unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi yang baik.

Dari fenomena tersebut, Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Pola Koordinasi dan koordinasi yang terjadi dalam Pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak (TASA) studi pada Dinas Sosial Provinsi Lampung. Fokus penelitian ini mengacu pada indikator dibawah ini :
 - a. Mendeskripsikan pola koordinasi yang terjadi pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, LKSA Bussaina dan Bank BNI KCU Tanjung Karang dalam mengelola program Tabungan Sosial Anak (TASA).
 - b. Unit-Unit atau Organisasi
Hal ini merujuk pada lembaga-lembaga yang terkait dalam proses pengelolaan Tabungan Sosial Anak (TASA).

c. Sumber-sumber atau potensi

Hal ini merujuk pada bagaimana sumber-sumber atau potensi yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam melakukan pengelolaan program TASA.

d. Kesatupaduan

Hal ini merujuk pada bagaimana pertautan atau hubungan antara Dinas Sosial Provinsi Lampung, LKSA Bussaina serta Bank BNI KCU Tanjung Karang sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan yang kompak.

e. Gerak kegiatan

Hal ini merujuk pada bagaimana segala daya upaya dan tindakan yang dikerjakan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam mengkoordinasikan program kepada BNI dan LKSA yang ada di Lampung.

f. Keserasian

Hal ini merujuk pada bagaimana urutan pengerjaan pengelolaan program TASA yang tersusun secara logis, sistematis atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi, maupun pertentangan.

- g. Arah yang sama atau sasaran

Hal ini merujuk pada siapa sasaran yang sudah ditetapkan dan segala potensi itu diarahkan ke sasaran yang satu itu juga, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

2. Kendala-Kendala dalam Koordinasi

Hal ini merujuk berdasarkan kendala Dinas Sosial Provinsi Lampung terkait pengelolaan program TASA yaitu :

- e. Perbedaan dalam orientasi waktu
- f. Adanya perbedaan jarak geografis
- g. Terlalu sedikitnya komunikasi
- h. Tidak terdapatnya hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:218) *Purposive* merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Provinsi Lampung yang terletak di Jl.Basuki Rahmat No.72, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Adapun alasan peneliti Karena Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan lembaga yang

mengimplementasikan program Tabungan Sosial Anak (TASA) dan Dinas Sosial Provinsi Lampung bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan peneliti memilih LKSA Bussaina yang berlokasi di Untung Suropati No.51 RT.011 LK.II Kelurahan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dan Bank BNI Cabang Utama Tanjung Karang sebagai Bank yang bekerjasama dengan kementerian sosial untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut.

D. Informan Penelitian

Dalam Bungin (2011:107) Informan penelitian salah satu hal terpenting dalam mendukung proses penelitian karena melalui penentuan informan penelitian yang sesuai, maka peneliti akan mudah untuk mendapatkan data atau informasi terkait pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan prosedur purposive dalam menentukan informan. Prosedur purposive merupakan strategi untuk menentukan informan paling umum di dalam penelitian. Prosedur purposive dipilih untuk menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun tabel Informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti antara lain :

Tabel. 2 Daftar Informan

No	Informan	Instansi/Posisi	Informasi	Tanggal Wawancara
1	Ibu Shinta Ariska S.Sos M.M	KASI Rehabilitasi Anak dan LanSia (Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Peraturan Provinsi tentang TASA ,koordinasi yang dilakukan dan bagaimana pengelolaan program TASA	22/01/2019
2	Bapak Herman Tamin S.H M.H	Petugas Pendataan dan Verifikasi Bantuan Sosial Tabungan Sosial Anak (TASA) Pemerintah Provinsi Lampung (Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Petunjuk Teknis program Bantuan Sosial TASA, Landasan Hukum, Cara penyaluran Program dan Sosialisasi	27/11/2018
3	Bapak Dewa Komang	Staff/ Anggota Bank BNI Tanjung Karang	Koordinasi antara DinSos Provinsi Lampung berkaitan pencairan Dana TASA	12/02/2019
4	Ibu Rika	Operator/Staff Bank BNI Tanjung Karang	Koordinasi antara DinSos Provinsi Lampung berkaitan pencairan Dana TASA	12/02/2019
5	Bapak Budi Hidayat, A.md	Ketua LKSA Bussaina	Mengumpulkan berkas dan mengirimkan persyaratan calon penerima bantuan	07/02/2019

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

E. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofl dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Sumber data dapat berupa suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan faktor penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian. data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Pada penelitian ini Data primer didapatkan melalui hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dan wujud konkret dari data primer ini berupa hasil wawancara yang peneliti kutip dalam hasil penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Menurut Sugiyono menyatakan studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Pada penelitian ini, data sekunder yang akan peneliti dapatkan adalah data-data yang berasal dari dokumen Dinas Sosial Provinsi Lampung mengenai pola koordinasi pengelolaan Program TASA, internet, jurnal, skripsi dan tak lain melalui buku.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:222), dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus di validasi seberapa jauh peneliti siap untuk melakukan penelitian yang

selanjutnya akan terjun secara langsung ke lapangan. Adapun validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Validasi tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri melalui evaluasi diri.

1. Peneliti

Peneliti pada penelitian kualitatif sebagai *Human Instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, pedoman, wawancara, dan dokumentasi.

2. Perlengkapan Penelitian

Dalam penelitian ini, perlengkapan penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Kamera Handphone
- b. Alat tulis
- c. Recorder

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan mendeskripsikan pola koordinasi serta koordinasi yang terjadi dalam proses pengelolaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi.

Beberapa observasi yang dilakukan oleh peneliti, antara lain :

- 1) Melakukan pengamatan terhadap bagaimana pola koordinasi saat mengelola TASA di Dinas Sosial Provinsi Lampung
- 2) Melakukan pengamatan terhadap kerjasama Dinas Sosial dengan BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang
- 3) Melakukan pengamatan terhadap proses penerimaan program TASA di LKSA Bussaina.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh kejelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab dan bertatap muka ataupun tidak bertatap muka yaitu dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.

Menurut Margaret dan Melissa dalam Bakry (2016: 152) menjelaskan bahwa wawancara merupakan diskusi, biasanya berhadapan-hadapan antara pewawancara dan

seorang individu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang topik tertentu yang sedang diteliti wawancara.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang telah mendalam. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak terkait yaitu Kasi Rehabilitasi Anak dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Lampung, Staff Bank BNI Tanjung Karang, serta Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) .

3. Dokumentasi

Menurut Schatzman dan Strauss dalam Mulyana (2008:195), dokumen historis merupakan bahan penting dalam penelitian kualitatif. Menurut mereka, sebagai bagian dari metode lapangan peneliti dapat menelaah dokumen historis sumber-sumber sekunder lainnya, karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-dokumen ini sering menjelaskan sebagian aspek situasi tersebut.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, studi ini merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen yang berkaitan dengan pola koordinasi dalam pengelolaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung. Terkait penelitian yang dilakukan terdapat beberapa dokumen yang menunjang, diantaranya yaitu :

1. Petunjuk Teknis Bantuan Sosial TASA Kemensos RI.
2. Foto-foto terkait pengelolaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) di Provinsi Lampung.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Creswell dalam Tresiana (2016:62) bertujuan untuk mengelompokkan benda, orang, peristiwa dan property yang menjadi karakteristiknya. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2011: 129) teknik analisis data tersebut meliputi :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sehingga segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi dalam Sugiyono (2010:249). Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Dalam penelitian ini peneliti memilah-milah dan merangkum data yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu pola koordinasi dalam pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak (TASA) dan kendala-kendala dalam proses

pengelolaan. Kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pola koordinasi dalam proses pengelolaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:249) menyatakan *the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Maka, dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Berdasarkan penelitian yang diteliti peneliti menulis uraian singkat berupa point terpenting (inti) bisa dimulai dari fenomena permasalahan dan tindakan. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pengelolaan program TASA, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dan foto atau gambar sejenisnya, akan tetapi, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah teks naratif.

3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing (verivication)*)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:252) langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan pola koordinasi dan koordinasi yang terjadi dalam pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak (TASA) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung, Bank BNI Tanjung Karang dan LKSA Bussaina.

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh menurut Moeloeng, mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria.

Dalam Sugiyono (2011:332) Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kriteria derajat kepercayaan. Penerapan derajat kepercayaan dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dengan menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Mathison dalam Sugiyono, nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

Dalam penelitian ini triangulasi digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memenuhi data primer yang tidak didapat melalui observasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung situasi yang terjadi dalam pelaksanaan dilokasi. Dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian. Triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan kejadian yang sebenarnya saat melakukan observasi dan ditambah dokumentasi. Triangulasi disajikan dengan menampilkan dokumen, wawancara, observasi yang peneliti dapat dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan derajat kepercayaan dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan dikompilasikan dengan hasil dokumentasi dan observasi yang memiliki kesamaan informasi. Informan tersebut berasal dari pihak Dinas Sosial Provinsi Lampung, BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang, dan pihak LKSA Bussaina.

Observasi yang dilakukan pada saat peneliti turun lapangan serta dokumentasi yang didapatkan dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, staff BNI Kantor Cabang Utama Tanjung Karang, dan ketua LKSA Bussaina.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka kesimpulan akhir tentang Pola Koordinasi Pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak (TASA) Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah Pola Koordinasi *Horizontal Interrelated* dan secara keseluruhan proses koordinasi dalam pengelolaan program ini cukup baik, hal ini dapat dilihat melalui :

1. Pola koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung kepada BNI serta LKSA adalah Pola Koordinasi *Horizontal Interrelated* , Koordinasi *Horizontal Interrelated* yaitu koordinasi antar badan/instansi beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setara. Karena dalam dalam penelitian yang dilakukan peneliti koordinasi yang melibatkan Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan BNI serta LKSA Bussaina tersebut memiliki fungsi berbeda namun intansi satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan dan levelnya setaraf.

2. Pendekatan Koordinasi yang baik menurut Dann Sughandha harus meliputi 6 unsur :

- a. Unit-Unit atau Organisasi-Organisasi dalam penelitian ini, masing-masing instansi/lembaga yakni Dinas Sosial Provinsi Lampung sudah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan BNI, serta LKSA Bussaina dalam mengelola dan melaksanakan Program Bantuan Sosial Tabungan Sosial Anak (TASA) dengan cukup baik, dimana Masing-masing unit organisasi mengakui akan arti pentingnya koordinasi serta telah mengetahui dan melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan program TASA, meskipun ada sedikit tumpang tindih tugas antar lembaga namun hal tersebut merupakan prosedur dari pusat.
- b. Sumber-sumber (potensi), jika dilihat dari segi penerapan teknologi, tidak dijelaskan secara mendetail oleh para informan, hanya saja data calon penerima harus valid sesuai Basis Data Terpadu (BDT), dan data yang tidak sesuai atau tidak valid maka tidak dapat diproses lebih lanjut maka dikembalikan kepada LKSA untuk di lengkapi kembali, Untuk penggunaan anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung menyatakan bahwa telah meminimalisir penggunaan anggaran agar lebih bisa efisien. Dalam hal sumber-sumber atau potensi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terlibat dalam program TASA merupakan orang-orang yang kompeten dan untuk anggaran sudah cukup efisien jika melihat sudah berjalannya pembagian bantuan TASA.

- c. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa, dalam hal kesatupaduan pihak Dinas Sosial Provinsi Lampung sudah melakukan pengintegrasian namun belum melakukan koordinasi yang maksimal karena dalam mengintegrasikan tidak pernah melakukan peninjauan langsung ke LKSA-LKSA serta tidak melakukan pertemuan antara Dinas Sosial, LKSA Bussaina dan BNI secara langsung, karena untuk melakukan kesatupaduan seharusnya melakukan koordinasi sebaik mungkin antara 3 lembaga terkait agar terjadi pengintegrasian yang baik serta agar terjalin hubungan dan komunikasi yang baik antar berbagai instansi. Dan dalam hal kekompakan antara instansi menurun karena pengelolaan sempat tidak berjalan beberapa bulan.
- d. Dalam hal Gerak kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi terkait dengan pengelolaan program Tabungan Sosial Provinsi Lampung, dapat dikatakan bahwa belum cukup baik, dimana proses pelaksanaan program TASA sempat tidak berjalan beberapa bulan sehingga menimbulkan lambatnya waktu pelaksanaan yang mengakibatkan ketidakefisienan dibidang waktu meskipun ada kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak termasuk target dan jadwalnya.
- e. Dalam hal keserasian masing-masing instansi sudah melakukan proses pengelolaan Tabungan Sosial Anak (TASA) dengan cukup baik, yaitu dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan baik dan terkoordinir dengan cukup baik sampai terlaksananya pembagian bantuan TASA.

- f. Koordinasi dalam mewujudkan pengelolaan program TASA yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung, LKSA Bussaina dan BNI Tanjung Karang telah berjalan dengan baik, karena masing-masing lembaga memiliki kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama, sasaran program TASA ini adalah untuk menjangkau anak terlantar, balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
3. Kendala yang terjadi pada saat pengelolaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) antara lain, perbedaan dalam orientasi waktu yakni seperti terlalu panjangnya proses sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, terlalu minimnya komunikasi sehingga masih banyak terjadinya kesalahan pengisian identitas anak, anak tidak mempunyai identitas, terkendala dengan identitas anak balita terlantar yang belum memiliki identitas resmi. Serta adanya perbedaan jarak geografis, yaitu keberadaan lokasi LKSA yang cukup jauh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu:

1. Guna kelangsungan koordinasi yang efektif dan efisien untuk program selanjutnya pihak Dinas Sosial Provinsi Lampung diharapkan agar lebih mempertimbangkan efisiensi waktu agar proses cepat dan tidak terlalu memakan waktu yang lama.
2. Pihak Dinas Sosial perlu melakukan pertemuan secara terstruktur dan formal serta melakukan observasi lapangan guna meningkatkan kekompakan antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan suatu program.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Pandi.2018.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekan Baru. Nusa Media Yogyakarta
- Hasibuan, S.P.M. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- Handoko.T. Hani .2011. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah* .Jakarta : PT Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafie, M.Si.2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Moloeng Lexy j. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Moekijat.1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung:Mandar Maju
- Mulyasa .2011.*Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani.2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Penerbit Alfabeta Bandung
- Soekanto, Soerjono.1993. *Mengenal Sosiologi Hukum*.Bandung.Citra Aditya Bakti
- Sugandha, Dann.1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Jakarta: Djambatan
- Tresiana, Novita.2016. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara
- Torang Samsir .2014. organisasi dan manajemen (perilaku struktur,budaya dan perubahan organisasi) alfabeta bandung

KARYA ILMIAH

Sedarmayanti.2014. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Mandar Maju *Tinjauan Tentang Manajemen*. PDF digilib.unila.ac.id diakses pada 1 September 2018 pukul 20.00

Sosiawan , Harry Puguh dalam Telaah Tentang *Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial* (Pandangan 6 Fraksi MPR Dalam Proses Amandemen Ke04 Pasal 34 UUD'45)

Teori Kesejahteraan Sosial Masyarakat .
<https://www.scribd.com/document/367503216/Teori-Kesejahteraan-Sosial-Masyarakat> diakses pada 02 September 2018 Pukul 13.00

PERATURAN

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Petunjuk Teknis Bantuan Sosial TASA Kemensos RI Tahun 2018.

LAINNYA

Pencerahan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung. Lampungprov.go.id diakses pada 02 Agustus 2018 pukul 14.30)

Kemensos, "*Tabungan Sosial Anak*". <http://yandatin.kemensos.go.id/index.php?action=artikel&cat=21&id=53&artlang=id>, (diakses pada 01 Agustus 2018 pukul 15.05)

Redaksi, "*Program Tabungan Sosial Untuk Anak Jalanan Bisa Lebih Baik*" <http://sinarkeadilan.com/program-tabungan-sosial-untuk-anak-semoga-kehidupan-anak-jalanan-bisa-lebih-baik/>, (diakses pada 01 Agustus 2018 pukul 15.30)

TimRedaksi.2017.“BantuanProgramTabunganAnakSejahtera(TASA),
<http://lampungprov.go.id/berita/bantuan/program-tabungan-anak-sejahtera-tasa.html> (diakses pada 01 Agustus 2018 Pukul 16.00).

Tribunnews.com.*Mensos Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Harus Terpadu.*
(diakses pada 1 agustus 2018 pukul 15.40)

Hidayati,Nur.2016.Kemiskinan Sebagai Masalah Sosial.
<http://nurohidayati29.web.unej.ac.id/2016/05/30/kemiskinan-sebagai-maslah-sosial/> .Diakses pada 6 November 2018 pukul 22.00)